



BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 82 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG  
RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 57);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023.

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 57) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2023 NOMOR 82

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 82 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI GARUT NOMOR 57 TAHUN  
2023 TENTANG RENCANA KERJA  
DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA TAHUN 2023

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Strategi komunikasi global diperlukan dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi, karena Perkembangan teknologi komunikasi informasi telah membawa bangsa Indonesia memasuki gerbang peradaban informasi, banyak perubahan mendasar dan membawa dampak yang luas di bidang politik, ekonomi dan sosial yang harus dihadapi dengan arif dan hati-hati. Adalah merupakan tantangan yang besar saat bangsa Indonesia berbenah diri dari keterpurukan untuk membangun Indonesia baru, pada saat itu pula harus memasuki era informasi.

Beberapa hal yang menjadi dasar perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 yaitu

1. Penguatan Sarana dan Prasarana *Command Centre* Guna menunjang SPBE; dan
2. Optimalisasi Penguatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Garut.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yaitu **"Bertaqwa, Maju dan Sejahtera"**,

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut telah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan SKPD yaitu Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut Tahun 2023 adalah dokumen rencana pembangunan untuk

periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Diskominfo Tahun 2019-2024 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2023, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Perubahan Diskominfo Kabupaten Garut Tahun 2023 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Diskominfo Kabupaten Garut tahun 2023, yang mengarah pada pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta memperhatikan pula program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut disusun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

- 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25), dan peraturan menyangkut kewenangan Dinas Komunikasi dan Informasi lainnya
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

- (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
  31. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

- Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
32. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
  33. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 56);
  34. Peraturan Bupati Garut Nomor 257 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
  35. Peraturan Bupati Garut tentang perubahan atas Peraturan Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Renstra Diskominfo Tahun 2019 sampai dengan 2024.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Renja Perubahan Diskominfo Tahun 2023 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Diskominfo Tahun 2023 adalah sebagai acuan Diskominfo dalam mengoperasionalkan RKPD Perubahan Kabupaten Garut Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi jangka menengah daerah Kabupaten Garut.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Substansi Renja Perubahan Diskominfo Kabupaten Garut Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I       PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum

penyusunan Renja Perubahan SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

**BAB II      BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN.**

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD; Analisis Kinerja Pelayanan SKPD; Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**BAB III     RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat Rangkuman serta Analisis mengenai dasar atau penyebab perubahan rencana kerja dan pendanaan pada setiap program kegiatan yang mengalami perubahan; Uraian perubahan rencana kerja dan pendanaan yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

**BAB IV     PENUTUP**

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta Rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023 Berkenaan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.**

Renja Perubahan Diskominfo merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Diskominfo, pengukuran Tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dan dilaksanakan diantaranya dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Diskominfo yang merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Realisasi Program Renacan Kerja Tahun 2023 pada sisi akuntabilitas keuangan, laporan realisasi APBD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp. 7.771.419.513,- atau terealisasi 42,47% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 18.299.384.760

Dalam hal capaian kinerja sasaran program Tahun 20223 terhadap dokumen perencanaan yang ada yaitu Rencana Kerja Diskominfo Tahun 2023 dan Rencana Stratejik Diskominfo Tahun 2019-2024 dapat diambil kesimpulan secara umum mengenai pencapaian sasaran program/kegiatan terhadap dokumen Renstra Diskominfo Tahun 2019 – 2024 menunjukkan kinerja sasaran yang baik (pencapaian target hingga 100 %).

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 samapi dengan triwulan II Diskominfo Kabupaten Garut selama Tahun Anggaran 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.229.384.760,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.771.419.513,- atau 42,47% dimuat dalam tabel 2.1.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan

pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Diskominfo sebagai berikut:

- a. Belum dipahaminya secara utuh tentang Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*) yang ingin dicapai, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
- b. Kriteria penilaian pencapaian kinerja harus dirancang dalam konsep pemahaman yang mudah dipahami, spesifik, dapat diukur (kuantitatif), spesifik, tidak bias, namun tetap memberikan derajat kemampuan penilaian yang tinggi;
- c. Keterbatasan data elektronik yang diperlukan bagi komunikasi dan informasi publik ;
- d. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam Informasi Teknologi;
- e. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan teknologi yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja;
- f. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Kebijakan/tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja organisasi tersebut diantaranya melalui peningkatan kompetensi aparatur pada lingkungan internal Diskominfo, terutama dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang komunikasi dan informatika. Selain itu juga perlu dikembangkan strategi koordinasi yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja organisasi melalui dukungan eksternalitas organisasi.

**Tabel 2.1**  
**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Diskominfo Kabupaten Garut Tahun 2023**  
**untuk Triwulan I s/d Triwulan II**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	Target Renstra SKPD Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja		Ket.
			5	Rp.	7	Rp.	I	II	8	9	10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11	13 = 12/7 * 100%	Target	Realisasi	
1	3	4	5	Rp.	7	Rp.	8	9	10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11	13 = 12/7 * 100%	14	15	16	17	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi perkantoran															
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.000.000,00		168 HOK	42.271.000	25%	10.430.000	26%	11.000.000	50,70%	21.430.000	50,70%	21.430.000	1 Paket	1 Paket	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.198.599.918,00		65 Orang	6.058.917.021,00	16%	999.398.704	28%	1.673.805.354	44,12%	2.673.204.058	44,12%	2.673.204.058	1 Paket	1 Paket	
3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	49.938.400,00		7 Dokumen	119.849.600,00	10%	12.212.000,00	15%	17.412.800	24,72%	29.624.800	24,72%	29.624.800	1 Paket	1 Paket	

4	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	174.967.500,00	5 Orang Security	187.587.086,00	1%	1.880.000,00	24%	45.787.000	25,41%	47.667.000	25,41%	47.667.000	1 Paket	1 Paket	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12.000.000,00	5 Jenis	11.550.600,00	28%	3.286.200,00	49%	5.665.800	77,50%	8.952.000	77,50%	8.952.000	1 Laporan	1 Laporan	
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19.534.300,00	2 Jenis	9.223.600,00	63%	5.845.600,00	14%	1.260.000	77,04%	7.105.600	77,04%	7.105.600	1 Laporan	1 Laporan	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	120.000.000,00	50 Jenis	88.353.363,00	100%	88.085.300,00	0%	0	99,70%	88.085.300	99,70%	88.085.300	3 Laporan	3 Laporan	
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	52.000.000,00	5 Jenis	61.331.600,00	32%	19.518.000,00	34%	21.154.000	66,31%	40.672.000	66,31%	40.672.000	1 Laporan	1 Laporan	
10	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	65.000.000,00	2 Jenis	48.710.600,00	22%	10.533.600,00	9%	4.513.000	30,89%	15.046.600	30,89%	15.046.600	1 Laporan	1 Laporan	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.475.000,00	350 HOK	68.746.000,00	19%	12.958.200,00	34%	23.640.000	53,24%	36.598.200	53,24%	36.598.200	16 Unit	16 Unit	
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	145.000.000,-	1 Unit	196.523.540,00	31%	61.819.015,00	28%	54.898.668	1 Unit	59,39%	59,39%	116.717.683	16 Unit	10 Unit	

13	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24.950.000,-	3 Unit	35.510.000,00	23%	8.240.000,00	33%	11.890.000	56,69%	20.130.000	56,69%	20.130.000	1 Paket	1 Paket
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	231.239.185,00	3 Rekening	180.806.750,00	2%	2.780.000,00	25%	44.460.000	3 Rekening	26,13%	26,13%	47.240.000	1 Paket	1 Paket
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60.000.000	3 Jenis	66.550.000,00	29%	19.500.000	60%	39.930.000	89,30%	59.430.000	89,30%	59.430.000	1 Paket	1 Paket
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30.000.000	4 Orang	19.400.000,00	7%	1.297.400	21%	4.039.500	27,51%	5.336.900	27,51%	5.336.900	1 Paket	1 Paket
II	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	prosentase informasi publik yang didesiminasikan kepada masyarakat													
1	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	350.000.000	1 Dokumen	107.250.000	22%	24.000.000	22%	24.000.000	44,76%	48.000.000	44,76%	48.000.000	1 Dokumen (192 konten)	1 Dokumen (53 konten)
2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	360.275.000	1 Dokumen	33.965.100	48%	16.180.000	12%	4.110.000	59,74%	20.290.000	59,74%	20.290.000	1 Dokumen (98 konten)	1 Dokumen (139 konten)

		Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
3	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	100.000.000	1 Dokumen	142.646.100	23%	32.920.000	21%	29.690.000	43,89%	62.610.000	43,89%	62.610.000	1 Dokumen (102 pengaduan)	1 dokumen (102 sudah diverifikasi)	
4	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	1.500.000.000	1 Layanan	1.080.700.000	22%	242.335.050	27%	295.905.050	49,80%	538.240.100	49,80%	538.240.100	1 Layanan (84 media)	1 Layanan (84 media)	
5	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	350.000.000	9 Orang	385.199.200	0%	0	1%	2.420.000	0,63%	2.420.000	0,63%	2.420.000	9 Orang (930 rilis)	9 Orang (554 rilis)	
6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	360.000.000	1 Dokumen	23.740.000	17%	4.007.500	17%	3.997.500	33,72%	8.005.000	33,72%	8.005.000	1 Dokumen (84 kelompok)	1 Dokumen (84 kelompok)	
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	Terselenggaranya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Seluruh SKPD														
1	PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN DALAM	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	89%	48.977.500	100%	48.949.350	0%	0	99,94%	48.949.350	99,94%	48.949.350	1 Dokumen	1 Dokumen	

2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	12.500.000.000	90%	5.038.620.600	9%	472.279.000	15%	742.737.600	24,11%	1.215.016.600	24,11%	1.215.016.600	1 Unit	7 Berkas (182 titik)	
3	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	649.970.000	90%	213.589.000	23%	49.040.000	27%	57.800.000	50,02%	106.840.000	50,02%	106.840.000	1 Dokumen (12 berkas)	7 berkas	
4	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1.500.000.000	89%	1.699.460.000	1%	25.200.000	96%	1.623.860.000	97,03%	1.649.060.000	97,03%	1.649.060.000	1 Unit	1 Unit	
5	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1.700.000.000	95%	1.193.070.724	15%	182.589.400	39%	463.963.430	54,19%	646.552.830	54,19%	646.552.830	3 Layanan	7 berkas (3 layanan)	
6	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	125.000.000	92%	204.034.250	0%	0	0%	0	0,00%		0,00%		1 Dokumen (12 Berkas)	7 berkas	

7	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	150.000.000	95%	28.420.000	62%	17.495.000	0%	0	61,56%	17.495.000	61,56%	17.495.000	1 Dokumen	7 berkas
8	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	120.000.000	95%	68.967.826	71%	48.634.492	8%	5.828.800	78,97%	54.463.292	78,97%	54.463.292	1 Dokumen	1 Dokumen
9	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	270.000.000	90%	112.829.100	0%	0	1%	1.270.000	1,13%	1.270.000	1,13%	1.270.000	1 Dokumen	7 berkas
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menggunakan data statistik sektoral													
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	250.000.000	1 Dok	167.000.000	27%	45.127.200	4%	7.257.400	31,37%	52.384.600	31,37%	52.384.600	1 Dokumen	1 Dokumen
2	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	250.000.000	1 Dok	155.000.000	1%	918.600	4%	6.060.000	4,50%	6.978.600	4,50%	6.978.600	1 Dokumen	1 Dokumen

3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	200.000.000	55 SKPD	120.000.000	16%	18.816.000	23%	27.798.000	38,85%	46.614.000	38,85%	46.614.000	33 SKPD	33 SKPD
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Prosentase perangkat daerah yang memiliki keamanan informasi diatas													
1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	300.000.000	2 Dok	76.119.800	10%	7.320.000	17%	12.680.000	26,27%	20.000.000	26,27%	20.000.000	1 Dokumen (12 Laporan)	7 laporan
2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	192.000.000	1 Lap	103.261.800	1%	1.290.000	2%	1.840.000	3,03%	3.130.000	3,03%	3.130.000	1 Laporan (12 draft)	7 draf
3	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	775.000.000	1 Unit	101.203.000	2%	2.310.000	4%	3.550.000	5,79%	5.860.000	5,79%	5.860.000	96 Perangkat	34 perangkat
	<b>JUMLAH</b>				<b>18.299.384.760</b>	14%	<b>2.497.195.611,00</b>	29%	<b>5.274.223.902,00</b>		<b>7.771.419.513,00</b>		<b>7.771.419.513,00</b>		

Realisasi anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar Rp. 7.771.419.513 dari Total Anggaran sebesar Rp. 18.299.384.760 atau terealisasi sebesar Rp. 42,47 %.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Penyelenggaraan pelayanan Diskominfo Kabupaten Garut sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 257 Tahun 2021 Kabupaten Garut.

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 Peraturan Bupati Garut Nomor 257 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 257 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Pengelolaan urusan Pemerintahan dan tugas Pembantuan urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik. Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan urusan komunikasi dan informatika;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan komunikasi dan informatika;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 257 Tahun 2021 tentang Tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Diskominfo adalah urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik

Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 C dan Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut, terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 3 (tiga) Bidang, 9 (Sembilan) Seksi, 1 (satu) UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

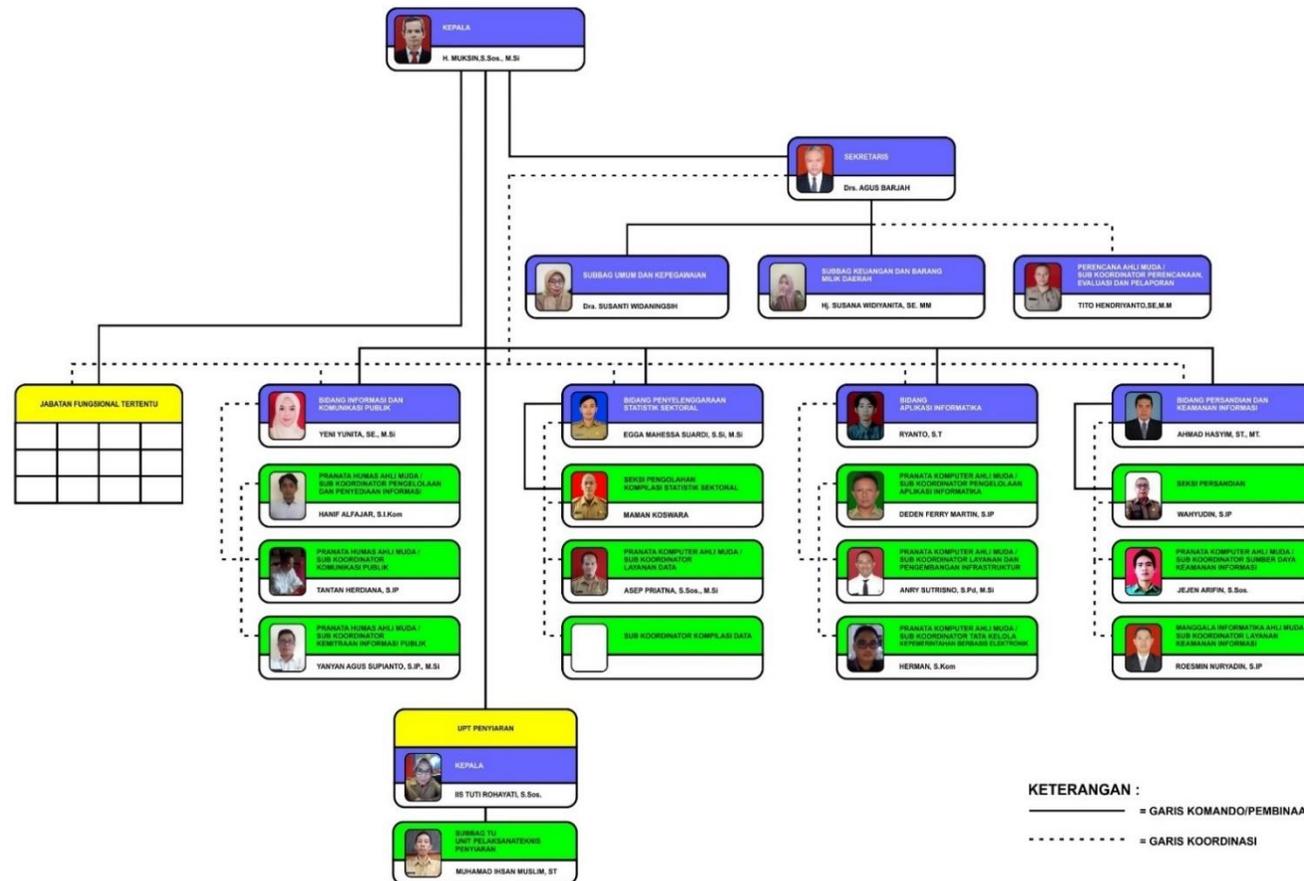
Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari;

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
  3. Kelompok Sub Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahkan :
  1. Kelompok Sub-Substansi Pengelolaan Informasi;
  2. Kelompok Sub-Substansi Komunikasi Publik; dan
  3. Kelompok Sub-Substansi Kemitraan Informasi Publik.

- d. Bidang Aplikasi Informatika, membawahkan:
  - 1. Kelompok Sub-Substansi Pengelolaan Aplikasi Informatika;
  - 2. Kelompok Sub-Substansi Layanan dan Pengembangan Infrastruktur; dan
  - 3. Kelompok Sub-Substansi tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- e. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi membawahkan ;
  - 1. Seksi Persandian;
  - 2. Kelompok Sub-Substansi Layanan Keamanan Informasi;
  - 3. Kelompok Sub-Substansi Sumber Daya Keamanan Informasi;
- f. Bidang Penyelenggaraan Statistik Sektoral
  - 1. Kepala Seksi Pengolahan Kompilasi Data Statistik Sektoral;
  - 2. Kelompok Sub-Substansi Kompilasi Data;
  - 3. Kelompok Sub-Substansi Layanan Data.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GARUT  
PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 235 TAHUN 2021**



Keadaan Pegawai Diskominfo Garut berdasarkan Jumlah :

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Prosentase
1.	PNS	47	60%
2.	CPNS	1	1%
3.	Honorer	10	13%
4.	Outsourcing	20	26%
<b>Jumlah</b>		64	

Pencapaian kinerja pelayanan Diskominfo Kabupaten Garut dapat dilihat dari pencapaian Indikator kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut Nomor : 710/015/Diskominfo Tahun 2019 Diskominfo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut dikaitkan dengan target dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfo Kabupaten Garut**

No	Indikator kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi capaian tahun ke					Rasio Capaian pada tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Prosentase SKPD pemerintah yang terintegrasi layanan berbasis elektronik			Cakupan layanan akses internet, intranet dan komunikasi intra pemerintah daerah	204 titik	306 titik	408 titik	510 titik	600 titik	204 titik	306 titik	408 titik			34%	51%	68%		
				Jumlah infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK yang terlayani	2 data center	3 data center	4 data center	5 data center	6 data center	2 data center	3 data center	4 data center			33%	50%	67%		

No	Indikator kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi capaian tahun ke					Rasio Capaian pada tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
				prosentase ketersediaan Sumber Daya TIK Pemda	75 orang	150 orang	225 orang	300 orang	375 orang	75 orang	150 orang	225 orang			20%	40%	60%		
				prosentase wifi area publik terlayani	35	40	45	50	55	35	40	45			64%	73%	82%		
				cakupan pengembangan fungsionalitas website pemkab	1	1	1	1	1	1	1	1			82%	82%	82%		
				cakupan command center yang terkelola	1	1	1	1	1	1	1	1			90%	90%	90%		
				cakupan layanan smart city	1	2	3	4	5	1	2	3			20%	40%	60%		
				Jumlah regulasi yang ditetapkan	1 Kebijakan	2 Kebijakan	3 Kebijakan	4 Kebijakan	5 Kebijakan	1 Kebijakan	2 Kebijakan	3 Kebijakan			20%	40%	60%		

No	Indikator kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi capaian tahun ke					Rasio Capaian pada tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
				Jumlah SKPD yang terlayani aplikasi umum dan aplikasi khusus yang terintegrasi	2 SKPD	4 SKPD	6 SKPD	8 SKPD	10 SKPD	2 SKPD	4 SKPD	6 SKPD			20%	40%	60%		
				cakupan SDM masyarakat pengguna layanan pemerintahan berbasis elektronik kabupaten	42 kecamatan	42 kecamatan	42 kecamatan	42 kecamatan	42 kecamatan	42 kecamatan	42 kecamatan	42 kecamatan			85%	85%	85%		
				Jumlah subdomain SKPD yang terlayani	28 subdomain	49 subdomain	64 subdomain	79 subdomain	96 subdomain	28 subdomain	49 subdomain	64 subdomain			29%	51%	67%		
				cakupan layanan pengadaan secara elektronik	75 SKPD	75 SKPD	75 SKPD	75 SKPD	75 SKPD	75 SKPD	75 SKPD	75 SKPD			90%	90%	90%		
				Jumlah SKPD yang mempunyai perangkat lunak legal	15 SKPD	30 SKPD	45 SKPD	60 SKPD	75 SKPD	15 SKPD	30 SKPD	45 SKPD			20%	40%	60%		

No	Indikator kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi capaian tahun ke					Rasio Capaian pada tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
2	Prosentase informasi pemerintah yang terfasilitasi melalui keamanan informasi			Jumlah Kebijakan tata kelola keamanan informasi	1 dokumen		2 dokumen		3 dokumen	1 dokumen		2 dokumen			33%		67%		
				prosentase perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen pengamanan informasi pada level II	15 SKPD	30 SKPD	45 SKPD	60 SKPD	75 SKPD	15 SKPD	30 SKPD	45 SKPD			20%	40%	60%		

No	Indikator kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi capaian tahun ke					Rasio Capaian pada tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
				prosentase Perangkat daerah yang pegawainya memiliki tingkat kesadaran keamanan informasi kategori " BAIK"	15 SKPD	30 SKPD	45 SKPD	60 SKPD	75 SKPD	15 SKPD	30 SKPD	45 SKPD			20%	40%	60%		
				Jumlah aparatur pemerintahdaerah yang telah mendapatkan peningkatan kompetensi	30 orang	60 orang	90 orang	120 orang	150 orang	30 orang	60 orang	90 orang			20%	40%	60%		

No	Indikator kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi capaian tahun ke					Rasio Capaian pada tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
				prosentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan dan penilaian resiko dan prosentase sistem elektronik yang telah memanfaatkan sertifikat elektronik	15 sistem elektronik	30 sistem elektronik	45 sistem elektronik	60 sistem elektronik	75 sistem elektronik	15 sistem elektronik	30 sistem elektronik	45 sistem elektronik			20%	40%	60%		
				Jumlah infrastruktur, perangkat keras, perangkat lunak, dan/atau fasilitas teknologi keamanan informasi	15 unit	30 unit	45 unit	60 unit	75 unit	15 unit	30 unit	45 unit			20%	40%	60%		

No	Indikator kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi capaian tahun ke					Rasio Capaian pada tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
				Prosentase keterhubungan perangkat daerah dalam jaringan komunikasi sandi	15 SKPD	30 SKPD	45 SKPD	60 SKPD	75 SKPD	15 SKPD	30 SKPD	45 SKPD			20%	40%	60%		
				Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan	10 koordinasi	20 koordinasi	30 koordinasi	40 koordinasi	50 koordinasi	10 koordinasi	20 koordinasi	30 koordinasi			20%	40%	60%		
				Jumlah perangkat daerah yang menjadi entitas audit	33 SKPD	33 SKPD	33 SKPD	33 SKPD	33 SKPD	33 SKPD	33 SKPD	33 SKPD			82%	82%	82%		
3	Prosentase ketersediaan layanan informasi dan komunikasi publik			Jumlah SKPD yang memiliki Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)	79 SKPD	79 SKPD	79 SKPD	79 SKPD	79 SKPD	79 SKPD	79 SKPD	79 SKPD			80%	80%	80%		

No	Indikator kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi capaian tahun ke					Rasio Capaian pada tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
				Jumlah data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan kemasyarakatan	2000 majalah	4000 majalah	6000 majalah	8000 majalah	10000 majalah	2000 majalah	4000 majalah	6000 majalah			20%	40%	60%		
				Jumlah informasi yang disampaikan ke media	3270 berita	6540 berita	9810 berita	13080 berita	16350 berita	3270 berita	6540 berita	9810 berita			20%	40%	60%		
				Prosentase kemitraan media massa dengan Pemkab Garut	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%		
				prosentase Jumlah sengketa informasi yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%		

No	Indikator kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi capaian tahun ke					Rasio Capaian pada tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
				Prosentase pengelolaan aduan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			100 %	100 %	100 %			
				Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat dan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra)	18 kelompok	36 kelompok	52 kelompok	68 kelompok	84 kelompok	18 kelompok	36 kelompok	52 kelompok			21%	43%	62%		
				Jumlah konten komunikasi publik	48 video	96 video	144 video	192 video	240 video	48 video	96 video	144 video			20%	40%	60%		
				Jumlah Kunjungan ke media massa	1 kunjungan	2 kunjungan	3 kunjungan	5 kunjungan	6 kunjungan	1 kunjungan	2 kunjungan	3 kunjungan			17%	33%	50%		
				Jumlah rilis berita	900 berita	1800 berita	2700 berita	3600 berita	4500 berita	900 berita	1800 berita	2700 berita			20%	40%	60%		
				Jumlah Videotron		1 unit	1 unit	2 unit	2 unit		1 unit	1 unit				50%	50%		

No	Indikator kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi capaian tahun ke					Rasio Capaian pada tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
4	Prosentase data statistik sektoral yang terpublikasikan			Jumlah dokumen statistik sektoral daerah	33 dokumen			90%	90%	90%									
				prosentase data statistik sektoral yang tersedia	15 data statistik sektoral	30 data statistik sektoral	45 data statistik sektoral	60 data statistik sektoral	75 data statistik sektoral	15 data statistik sektoral	30 data statistik sektoral	45 data statistik sektoral			20%	40%	60%		
				prosentase penyebarluasan informasi data statistik sektoral	15 data statistik sektoral yang disebarluaskan	30 data statistik sektoral yang disebarluaskan	45 data statistik sektoral yang disebarluaskan	60 data statistik sektoral yang disebarluaskan	75 data statistik sektoral yang disebarluaskan	15 data statistik sektoral yang disebarluaskan	30 data statistik sektoral yang disebarluaskan	45 data statistik sektoral yang disebarluaskan			20%	40%	60%		
				Jumlah aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi bidang statistik	30 orang	60 orang	90 orang	120 orang	150 orang	30 orang	60 orang	90 orang			20%	40%	60%		

No	Indikator kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi capaian tahun ke					Rasio Capaian pada tahun ke					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
				Jumlah koordinasi statistik sektoral	10 koor dina si	20 koor dina si	30 koor dina si	40 koor dina si	50 koor dina si	10 koor dina si	20 koor dina si	30 koor dina si			20%	40%	60%			
5	Prosentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi perkantoran			Jumlah Pembayaran Rekening Listrik dan Kawat	3 reke ning	3 reke ning	3 reke ning	3 reke ning	3 reke ning	3 reke ning	3 reke ning	3 reke ning			100 %	100 %	100 %			
				Jumlah STNK kendaraan	14 unit	20 unit	24 unit	26 unit	28 unit	14 unit	20 unit	24 unit			50%	71%	86%			
				Jumlah Peralatan Kebersihan	20 paket	20 paket	20 paket	20 paket	20 paket	20 paket	20 paket	20 paket	20 paket			90%	90%	90%		
				Jumlahn Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis			90%	90%	90%		
				Jumlah jenis ATK	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket			90%	90%	90%		
				Jumlah Jenis barang cetakan	20 jenis	22 jenis	22 jenis	22 jenis	22 jenis	22 jenis	20 jenis	22 jenis	22 jenis			91%	100 %	100 %		

No	Indikator kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi capaian tahun ke					Rasio Capaian pada tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
				Jumlah komponen peralatan listrik	20 item	20 item	20 item	20 item	20 item	20 item	20 item	20 item			80%	80%	80%		
				Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	10 unit	12 unit	14 unit	16 unit	18 unit	10 unit	12 unit	14 unit			55%	67%	78%		
				Jumlah Peralatan Rumah Tangga	15 jenis	15 jenis	15 jenis	15 jenis	15 jenis	15 jenis	15 jenis	15 jenis			82%	82%	82%		
				Jumlah makanan dan minuman harian pegawai dan makanan rapat	1450 dus /por si	1450 dus /por si	1450 dus /por si	1450 dus /por si	1450 dus /por si	1450 dus /por si	1450 dus /por si	1450 dus /por si			90%	90%	90%		
				Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	168 HO K	168 HO K	168 HO K	168 HO K	168 HO K	168 HO K	168 HO K	168 HO K			80%	80%	80%		
				Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	276 HO K	276 HO K	276 HO K	276 HO K	276 HO K	276 HO K	276 HO K	276 HO K			90%	90%	90%		
				Jumlah Perjalanan Dinas ke luar negeri	6 HO K	6 HO K	6 HO K	6 HO K	6 HO K	6 HO K	6 HO K	6 HO K			90%	90%	90%		

No	Indikator kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi capaian tahun ke					Rasio Capaian pada tahun ke					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
				Jumlah Jasa Keamanan Kantor	5 ORA NG	5 OR AN G	5 OR AN G			90%	90%	90%								
				Jumlah Pegawai Non PNS (TKK dan TKS)	16 Ora ng	16 Ora ng	16 Ora ng	16 Ora ng	16 Ora ng	16 Ora ng	16 Ora ng			90%	90%	90%				
6	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur Dinas Kominfo			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	14 item	16 item	18 item	22 item	26 item	14 item	16 item	18 item			54%	61%	69%			
				DED Rehabilitasi/ pemeliharaan gedung kantor	1 loka si										100 %					
				Jumlah kendaraan roda Dua		2 unit	4 unit	6 unit	8 unit		2 unit	4 unit					25%	50%		
				Jumlah kendaraan roda empat				2 unit	4 unit											
				Unit			1 unit											100 %		

No	Indikator kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi capaian tahun ke					Rasio Capaian pada tahun ke					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
				Gedung kantor yang direhabilitasi/dipelihara	4 loka si	4 loka si	4 loka si	4 loka si	4 loka si	4 loka si	4 loka si	4 loka si			82%	82%	82%			
7	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika yang akuntabel			Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	7 dok ume n	7 dok ume n	7 dok ume n	7 dok ume n	7 dok ume n	7 dok ume n	7 dok ume n	7 dok ume n			82%	82%	82%			
				Laporan Prognosis Realisasi Anggaran`	1 dok ume n	1 dok ume n	1 dok ume n	1 dok ume n	1 dok ume n	1 dok ume n	1 dok ume n	1 dok ume n	1 dok ume n			82%	82%	82%		
				Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja	7 dok ume n	7 dok ume n	7 dok ume n	7 dok ume n	7 dok ume n	7 dok ume n	7 dok ume n	7 dok ume n	7 dok ume n			82%	82%	82%		
8	Prosentase sumber daya aparatur yang terlati			Jumlah Pendidikan dan pelatihan formal	71 oran g	71 ora ng	71 ora ng	71 ora ng			82%	82%	82%							

No	Indikator kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi capaian tahun ke					Rasio Capaian pada tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
				Jumlah aparatur yang mengikuti Kursus, pelatihan, sosialisasi, Pendidikan PNS	55 orang	55 orang	55 orang	55 orang	55 orang	55 orang	55 orang	55 orang			82%	82%	82%		

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Diskominfo**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan urusan komunikasi dan informatika;
2. pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan komunikasi dan informatika;
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan peran Diskominfo sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan kepada beberapa tantangan dan permasalahan pokok yang bersumber dari internal lembaga maupun secara eksternal, antara lain:

- a. Terbatasnya infrastruktur penunjang *Command Centre* yang dapat mengakomodasi seluruh kegiatan SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut;
- b. Belum terintergrasinya data stunting yang ada di Pemerintah Kabupaten Garut;
- c. Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah belum optimal.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Diskominfo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang

dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain :

- a) Perbaiki berbagai sarana dan prasarana komunikasi dan media massa mulai dari pusat sampai ke daerah pedesaan sehingga akan mendukung pemerataan distribusi informasi
- b) Pembentukan pusat-pusat informasi yang dibutuhkan masyarakat serta pemberdayaan kelompok informasi yang tumbuh dari bawah akan sangat membantu makin meratanya pemahaman dan wawasan masyarakat terhadap informasi pembangunan
- c) Perbaiki sistem pengelolaan informasi pembangunan dan penyebarannya melalui pemberdayaan teknologi informasi sehingga terwujud pemerintahan yang berbasis informasi (e-government).

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2023**

Dalam rangka pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Garut, rumusan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 disusun dengan tema **“Penguatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”** Sebagai upaya mewujudkan tugas pokok Diskominfo Kabupaten Garut dalam pengelolaan Komunikasi dan Informasi serta tugas lain bidang Pemerintahan telah disusun rencana program kegiatan tahun 2023 yang terdiri dari 5 program, 12 kegiatan, 40 Sub Kegiatan.

Rencana program dan kegiatan Diskominfo yang terdapat pada RKPD Perubahan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel :

**Tabel 2.3 REVIEW TERHADAP RKPD PERUBAHAN TAHUN 2023  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GARUT**

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN KINERJA	BIAYA (Rp).	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	Catatan Penting
2	3	4		5	7	8	9	10	11	12
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kab. Garut	<b>Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan</b>	100%	7.609.039.138	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kab. Garut	<b>Persentase pemenuhan perencanaan kinerja SKPD sesuai ketentuan</b>	100%	7.120.533.209	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kab. Garut	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Laporan Capaian Kinerja serta evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	49.740.000	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kab. Garut	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Laporan Capaian Kinerja serta evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	49.740.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Garut	Jumlah Koordinasi	168 HOK	49.740.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Garut	Jumlah Koordinasi	168 HOK	49.740.000	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN KINERJA	BIAYA (Rp).	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	Catatan Penting
2	3	4		5	7	8	9	10	11	12
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Garut</b>	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN serta Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	<b>2 Dokumen</b>	<b>6.325.833.108</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Garut</b>	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN serta Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	<b>2 Dokumen</b>	<b>5.814.704.579</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang	6.253.679.808	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang	5.770.318.579	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Garut	'Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	7 Dokumen	72.153.300	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Garut	'Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	7 Dokumen	44.386.000	
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Garut</b>	<b>Tersedianya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah - SKPD Kantor</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>187.587.386</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Garut</b>	<b>Tersedianya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah - SKPD Kantor</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>187.587.386</b>	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Garut	Jumlah Jasa Keamanan Kantor	5 Security	187.587.386	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Garut	Jumlah Jasa Keamanan Kantor	5 Security	187.587.386	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN KINERJA	BIAYA (Rp).	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	Catatan Penting
2	3	4		5	7	8	9	10	11	12
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Garut</b>	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, cetakan dan penggandaan serta laporan fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rakor/konsultasi dan dokumen penatausahaan arsip dinamis	<b>6 Dokumen</b>	<b>294.396.159</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Garut</b>	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, cetakan dan penggandaan serta laporan fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rakor/konsultasi dan dokumen penatausahaan arsip dinamis	<b>6 Dokumen</b>	<b>277.110.449</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut	Jumlah Komponen Peralatan Listrik	5 Jenis	11.838.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut	Jumlah Komponen Peralatan Listrik	5 Jenis	8.815.500	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Garut	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	2 Jenis	9.227.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Garut	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	2 Jenis	1.622.500	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN KINERJA	BIAYA (Rp).	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	Catatan Penting
2	3	4		5	7	8	9	10	11	12
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Garut	Jumlah Jenis ATK	45 Jenis	86.110.909	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Garut	Jumlah Jenis ATK	45 Jenis	113.877.999	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Garut	Jumlah Jenis Barang Cetak	5 Jenis	59.542.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Garut	Jumlah Jenis Barang Cetak	5 Jenis	59.935.300	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut	Jumlah Makanan dan Minuman Harian	2 Jenis	64.995.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut	Jumlah Makanan dan Minuman Harian	2 Jenis	30.177.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	350 HOK	62.682.150	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	350 HOK	62.682.150	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Garut</b>	<b>Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional/lapangan, peralatan dan mesin lainnya</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>250.880.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Garut</b>	<b>Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional/lapangan, peralatan dan mesin lainnya</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>280.880.000</b>	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN KINERJA	BIAYA (Rp).	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	Catatan Penting
2	3	4		5	7	8	9	10	11	12
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut	Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda 4	1 Unit	235.880.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut	Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda 4	1 Unit	235.880.000	
Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Kab. Garut	Jumlah Pengadaan Komputer/PC	1 Unit	15.000.000	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Kab. Garut	Jumlah Pengadaan Komputer/PC	3 Unit	45.000.000	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Garut</b>	<b>Tersedianya Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>414.952.485</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Garut</b>	<b>Tersedianya Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>417.760.795</b>	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut	Rekening Listrik, Telepon dan Air	3 Rekening	212.822.585	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut	Rekening Listrik, Telepon dan Air	3 Rekening	224.821.895	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	3 Jenis	25.160.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	3 Jenis	48.170.000	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN KINERJA	BIAYA (Rp).	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	Catatan Penting
2	3	4		5	7	8	9	10	11	12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	4 Orang	176.969.900	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	4 Orang	144.768.900	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Garut</b>	<b>Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas dan pembayaran pajak/perizinannya serta sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>85.650.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Garut</b>	<b>Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas dan pembayaran pajak/perizinannya serta sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>92.750.000</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut	Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara	14 Unit	66.250.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garut	Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara	14 Unit	92.750.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut	Jumlah STNK Kendaraan	16 Unit	19.400.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut	Jumlah STNK Kendaraan	16 Unit	19,400,000	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN KINERJA	BIAYA (Rp).	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	Catatan Penting
2	3	4		5	7	8	9	10	11	12
<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Kab. Garut	Prosentase ketersediaan Informasi Publik Pemerintah daerah	100%	1.664.851.700	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Kab. Garut	Prosentase ketersediaan Informasi Publik Pemerintah daerah	100%	1.863.851.700	
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Tersebarluaskannya informasi dan Komunikasi kepada masyarakat Pemerintah Kab. Garut	6 Dokumen	1.664.851.700	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Tersebarluaskannya informasi dan Komunikasi kepada masyarakat Pemerintah Kab. Garut	6 Dokumen	1.863.851.700	
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Garut	Jumlah Vidio dan digital sign age	96 Video	175.195.000	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Garut	Jumlah Vidio dan digital sign age	96 Video	175.195.000	
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Garut	Jumlah konten penyiaran kepada masyarakat	82 Konten Penyiaran	32.984.400	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Garut	Jumlah konten penyiaran kepada masyarakat	82 Konten Penyiaran	32.984.400	
Pelayanan Informasi Publik	Kab. Garut	Prosentase sengketa infomasi dan Pengaduan yang terselesaikan	100%	95.509.300	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Garut	Prosentase sengketa infomasi dan Pengaduan yang terselesaikan	100%	95.509.300	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN KINERJA	BIAYA (Rp).	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	Catatan Penting
2	3	4		5	7	8	9	10	11	12
Layanan Hubungan Media	Kab. Garut	Jumlah langganan media massa	82 Langganan	1.124.933.000	Layanan Hubungan Media	Kab. Garut	Jumlah langganan media massa	82 Langganan	1.123.933.000,00	
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kab. Garut	Jumlah release berita	92 Release	100.330.000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kab. Garut	Jumlah release berita	92 Release	300.330.000,00	
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kab. Garut	Jumlah kelompok informasi masyarakat dan metra	84 Angka	135.900.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kab. Garut	Jumlah kelompok informasi masyarakat dan metra	84 Angka	135.900.000,00	
<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Kab. Garut</b>	<b>Tingkat kematangan Aplikasi SPBE Pemkab Garut</b>	<b>100%</b>	<b>4.930.243.200</b>	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Kab. Garut</b>	<b>Tingkat kematangan Aplikasi SPBE Pemkab Garut</b>	<b>100%</b>	<b>4.350.795.715</b>	
<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di</b>	<b>Kab. Garut</b>	<b>Terselenggaranya Sistem Pemerintahan Berbasis</b>	<b>100%</b>	<b>3.263.068.575</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di</b>	<b>Kab. Garut</b>	<b>Terselenggaranya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Seluruh SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>3.515.544.375</b>	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN KINERJA	BIAYA (Rp).	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	Catatan Penting
2	3	4		5	7	8	9	10	11	12
<b>Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Elektronik di Seluruh SKPD</b>			<b>Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>					
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Persentase subdomain skpd yang terlayani	89 %	50,000,000	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Persentase subdomain skpd yang terlayani	89 %	50.000.000,00	
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Garut	Persentase layanan informasi terintegrasi	90 %	3.263.068.575	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Garut	Persentase layanan informasi terintegrasi	90 %	3.465.544.375,00	
<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Garut</b>	<b>Cakupan teknologi informasi dan komunikasi</b>	<b>100%</b>	<b>1.667.174.625</b>	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Garut</b>	<b>Cakupan teknologi informasi dan komunikasi</b>	<b>100%</b>	<b>835.251.340</b>	
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Persentase Aplikasi Terintegrasi	90 %	298.927.200	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Persentase Aplikasi Terintegrasi	90 %	220.756.000,00	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN KINERJA	BIAYA (Rp).	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	Catatan Penting
2	3	4		5	7	8	9	10	11	12
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kab. Garut	Persentase infras data center,disaster recoveri center dan TIK yang terkelola	89 %	119.308.200	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kab. Garut	Persentase infras data center,disaster recoveri center dan TIK yang terkelola	89 %	111.436.920,00	
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kab. Garut	Jumlah CCTV, jumalh Command Center yang terkelola, Jumlah dokumen perencanaan gedung Command Center	14 CCTV	817.697.025	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kab. Garut	Jumlah CCTV, jumalh Command Center yang terkelola, Jumlah dokumen perencanaan gedung Command Center	14 CCTV	111.436.920,00	
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kab. Garut	Persentase cakupan layanan smart city dan Jumlah website terkelola	92 %	56.693.000	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kab. Garut	Persentase cakupan layanan smart city dan Jumlah website terkelola	92 %	33.520.000,00	
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Garut	Persentase cakupan SDM masyarakat pengguna layanan pemerintah berbasis elektronik	95%	53.660.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Garut	Persentase cakupan SDM masyarakat pengguna layanan pemerintah berbasis elektronik	95%	23.394.300,00	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN KINERJA	BIAYA (Rp).	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	Catatan Penting
2	3	4		5	7	8	9	10	11	12
Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Kab. Garut	Persentase lisensi aplikasi video conference Jumlah Unit Video Conference	100%	91.916.700	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Kab. Garut	Persentase lisensi aplikasi video conference Jumlah Unit Video Conference	100%	91.916.700,00	
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kab. Garut	Persentase cakupan layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut	95%	228.972.500	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kab. Garut	Persentase cakupan layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut	95%	242.790.500,00	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>					
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Kab. Garut</b>	<b>Indeks keamanan informasi (INDEKS KAMI)</b>	<b>350 Poin</b>	<b>308.000.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Kab. Garut</b>	<b>Indeks keamanan informasi (INDEKS KAMI)</b>	<b>350 Poin</b>	<b>300.000.000</b>	
<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Garut</b>	<b>Prosentase Ketersediaan Layanan Persandian dan Keamanan Informasi</b>	<b>100%</b>	<b>308.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Garut</b>		<b>100%</b>	<b>300.000.000</b>	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN KINERJA	BIAYA (Rp).	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	Catatan Penting
2	3	4		5	7	8	9	10	11	12
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	prosentase perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen pengamanan informasi pada level II	100%	50.000.000	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	prosentase perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen pengamanan informasi pada level II	100%	50.000.000,00	
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	prosentase Perangkat daerah yang pegawainya memiliki tingkat kesadaran keamanan informasi kategori " BAIK"	100%	58.000.000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	prosentase Perangkat daerah yang pegawainya memiliki tingkat kesadaran keamanan informasi kategori " BAIK"	100%	50.000.000,00	
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	prosentase perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen pengamanan informasi pada level II	85%	200.000.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut	prosentase perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen pengamanan informasi pada level II	85%	200.000.000,00	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>					

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN KINERJA	BIAYA (Rp).	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	Catatan Penting
2	3	4		5	7	8	9	10	11	12
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Kab. Garut</b>	<b>Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menggunakan data statistik sektoral</b>	<b>100%</b>	<b>395.302.075</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Kab. Garut</b>	<b>Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menggunakan data statistik sektoral</b>	<b>100%</b>	<b>445.302.075</b>	
<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Garut</b>	<b>Jumlah Dokumen Statistik Sektoral</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>395.302.075</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Garut</b>	<b>Jumlah Dokumen Statistik Sektoral</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>445.302.075</b>	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Garut	Jumlah dokumen statistik sektoral	1 Dok	130.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Garut	Jumlah dokumen statistik sektoral	1 Dok	130.000.000,00	
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab. Garut	Jumlah dokumen metadata statistik sektoral	1 Dok	83.000.000	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab. Garut	Jumlah dokumen metadata statistik sektoral	1 Dok	133.000.000,00	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		Jumlah SKPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan,	55 SKPD	52.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		Jumlah SKPD yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan	55 SKPD	52.000.000,00	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN KINERJA	BIAYA (Rp).	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	Catatan Penting
2	3	4		5	7	8	9	10	11	12
		Pelaksanaan dan Pelaporan								
Pengembangan Infrastruktur		Jumlah aplikasi statistik sektoral	1 Aplikasi	130.302.075	Pengembangan Infrastruktur		Jumlah aplikasi statistik sektoral	1 Aplikasi	130.302.075,00	
<b>JUMLAH</b>				<b>14.956.436.113</b>					<b>14.837.194.884</b>	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Diskominfo melakukan penelaahan dan kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun Kementerian/Lembaga.

**Tabel 2.5**  
**Rumusan Usulan Program/Kegiatan**  
**Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Validasi**  
**Provinsi/Kabupaten/kota**

<b>No.</b>	<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Indikator kinerja</b>	<b>Volume</b>	<b>Lokasi</b>	<b>SKPD Terkait</b>	<b>Validasi / Keterangan</b>
-	-	-	-	-	-	-

### **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Sejalan dengan paradigma baru di era globalisasi yaitu *Techno Economy*, teknologi menjadi faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Implikasi paradigma ini adalah terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya menjadi perekonomian yang berbasiskan pengetahuan. Akibat dari kondisi tersebut, salah satu kekuatan bangsa dapat pula diukur dari kemampuan iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) sebagai faktor primer ekonomi menggantikan modal, lahan dan energi untuk peningkatan daya saing. Pembangunan iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) merupakan sumber terbentuknya iklim inovasi yang menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas sumberdaya manusia, yang pada gilirannya dapat menjadi sumber pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Selain itu iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) menentukan tingkat efektifitas dan efisiensi proses transformasi sumberdaya menjadi sumber daya baru yang lebih bernilai.

Dengan demikian peningkatan kemampuan iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) sangat diperlukan untuk meningkatkan standar kehidupan bangsa dan negara, serta kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia di mata dunia.

Dalam mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, peran Komunikasi melalui Sistem Informasi sangatlah penting. Khususnya harus dapat menjalin proses Komunikasi yang harmonis dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam mengembangkan potensi daerahnya apabila tidak didukung oleh masyarakat begitu juga sebaliknya masyarakat tidak akan mendukung pemerintah, apabila tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Situasi dan kondisi ini akan memunculkan berbagai isu-isu strategis yang berkaitan dengan pertimbangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus diantisipasi dan diatasi dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Garut berupaya memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dengan seimbang melalui kegiatan dan tugas pokok dan fungsinya.

Sasaran Strategis Kemenkominfo :

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis Program Pemanfaatan Teknologi Informasi;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital dan Komunikasi;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik Program Komunikasi Publik;
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik Program Dukungan Manajemen.

Dalam mendukung arah kebijakan pusat terkait kewenangan Pemerintah Daerah Urusan Kominfo diantaranya melalui beberapa sasaran yaitu Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis Program Pemanfaatan Teknologi Informasi, Terwujudnya

masyarakat yang cerdas digital dan Komunikasi, Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah, Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik Program Komunikasi Publik, Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik Program Dukungan Manajemen.

Dilaksanakan melalui beberapa Program yaitu Program Komunikasi dan Informatika, Keamanan Informasi dan Statistik.

### **3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD**

Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan daerah tahun 2023, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Diskominfo yang dikaitkan dengan sasaran dan target kinerja Renstra Diskominfo, dalam rangka memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari misi yang telah dirumuskan sehingga dapat menggambarkan secara spesifik indikator kinerja keberhasilan, maka dari setiap misi ditetapkan tujuan dan sasaran Renja Diskominfo Tahun 2023.

Adapun tujuan dan sasaran dari ke-4 (empat) misi Diskominfo Kabupaten Garut tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Misi** : Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih (Misi 2 Janji Kampanye; Misi 4 RPJPD);

Misi kedua menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara melalui reformasi birokrasi pada seluruh aspek manajemen pemerintahan yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola pikir.

**Tujuan :**

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik /SPBE

**Sasaran :**

1. Terselenggaranya Pemerintah Berbasis elektronik;
2. Cakupan Penyebarluasan informasi dan komunikasi di Kabupaten Garut.

**3.3 Program dan Kegiatan**

Kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sementara Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Program dan kegiatan Diskominfo tahun 2023 merupakan pelaksanaan operasional tahun pertama dari Renstra Diskominfo tahun 2019-2024 dan disusun dengan mengacup ada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Garut Tahun 2023, berdasarkan Renstra Diskominfo tahun 2019-2024, program dan kegiatan indikatif Diskominfo pada tahun 2023 dijabarkan menurut 1 (satu) misi Diskominfo dimana setiap misi dijabarkan melalui kebijakan dan program, Secara lebih rinci rumusan rencana Program dan Kegiatan Perubahan Diskominfo Kabupaten Garut Tahun 2022 Dan Prakiraan Maju Tahun 2023 dituangkan dalam Tabel 3.1

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2023**

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Capaian Kinerja						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Latar belakang perubahan			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>								<b>18,158,462,155</b>	<b>17,702,152,766</b>			<b>32,606,533,503</b>			
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>								<b>7,685,062,155</b>	<b>7,379,390,766</b>			<b>8.841.288.503</b>			
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>								<b>49,741,000</b>	<b>42,271,000</b>			<b>65.000.000</b>			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	95 %	95 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	49,741,000	42,271,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	95 %	65.000.000	-
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								<b>6,640,322,116</b>	<b>6,054,319,227</b>			<b>6.248.538.318</b>			

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Capaian Kinerja								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				Latar belakang perubahan
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
			Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 %	95 %	68 Orang	68 Orang	100 %	100 %	6,520,472,516	6,000,269,627	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	95 %	6.198.599.918	-
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	95%	95 %	7 Dok	7 Dok	100 %	100 %	119,849,600	54,049,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	95 %	49.938.400	Pergeseran Penyesuaian Kegiatan Prioritas, Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>									<b>187,587,086</b>	<b>187,587,086</b>			<b>174.967.500</b>		
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Kantor	95%	95 %	1 Dok	1 Dok	100 %	100 %	187,587,086	187,587,086	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	95 %	174.967.500	-
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									<b>308,621,663</b>	<b>313,285,763</b>			<b>546.593.500</b>		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	Jumlah Komponen Peralatan Listrik	95 %	95 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	11,550,600	8,952,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	95 %	12.000.000	Pergeseran Penyesuaian kegiatan kegiatan prioritas, Jumlah Komponen Peralatan Listrik

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Capaian Kinerja								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Latar belakang perubahan	
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	95 %	95 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	9,223,600	7,105,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	95 %	19.534.300	Pergeseran Penyesuaian Kegiatan Prioritas, Jumlah Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	95 %	95 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	88,353,663	105,643,363	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	95 %	120.000.000	Pergeseran Penyesuaian Kegiatan Prioritas, Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	95 %	95 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	61,332,000	63,264,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	95 %	52.000.000	Penambahan Kegiatan Prioritas, Jumlah Jenis Barang Cetak
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	95 %	95 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	56,199,800	21,168,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	95 %	65.000.000	Pergeseran Penyesuaian Kegiatan Prioritas, Jumlah Makanan dan Minuman Harian
Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	95 %	95 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	81,962,000	107,152,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	95 %	134.475.000	-

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Capaian Kinerja							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				Latar belakang perubahan	
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
		Konsultasi SKPD													
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									<b>0</b>	<b>126,257,400</b>			<b>530.000.000</b>		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasiona 1 atau Lapangan yang Disediakan	95 %	95 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	58,707,400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	95 %	530.000.000	Penambahan Kegiatan Prioritas, Jumlah Rekening Listrik, Telepon dan Air
Pengadaan Mebel (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	95 %	95 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	0	35,800,000					Penambahan Kegiatan Prioritas, Jumlah Rekening Listrik, Telepon dan Air
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	95 %	95 %	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	0	31,750,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	92 %	0	Penambahan Kegiatan Prioritas, Jumlah Rekening Listrik, Telepon dan Air
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									<b>412,840,290</b>	<b>486,220,290</b>			<b>401.189.185</b>		
Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan	Rekening Listrik,	95 %	95 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	196,523,540	254,223,540	Dana Transfer Umum-	Persentase pemenuhan kebutuhan	92 %	145.000.000	Penambahan Kegiatan Prioritas, Jumlah Rekening

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Capaian Kinerja								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				Latar belakang perubahan
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
			Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Telepon dan Air									Dana Alokasi Umum	penunjang administrasi perkantoran		Listrik, Telepon dan Air	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	95 %	95 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	35,510,000	51,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	92 %	24.950.000	Penambahan Kegiatan Prioritas, Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	95 %	95 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	180,806,750	180,806,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	92 %	231.239.185	Penambahan Kegiatan Prioritas, Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									<b>85,950,000</b>	<b>169,450,000</b>			<b>365.000.000</b>		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	95 %	95 %	10 Unit	10 Unit	100 %	100 %	66,550,000	150,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	92 %	60.000.000	Penambahan Kegiatan Prioritas, Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Capaian Kinerja								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Latar belakang perubahan	
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasiona l atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinann ya	95 %	95 %	16 Unit	16 Unit	100 %	100 %	19.400.000	19.400.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi perkantoran	92 %	30.000.000	
<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>									<b>1,824,400,000</b>	<b>1,773,500,400</b>			<b>3.660.275.000</b>		
<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>									<b>1,824,400,000</b>	<b>1,773,500,400</b>			<b>3.660.275.000</b>		
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	prosentase informasi publik yang didesiminasi kansika kepada masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaa n Konten dan Perencana an Media Komunikas i Publik	82 %	82 %	1 Dok	1 Dok	100%	100%	107,250,000	107,250,000	Pendapat an Bagi Hasil	prosentase informasi publik yang didesiminasi kansika kepada masyarakat	82 %	450.000.000	-
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	prosentase informasi publik yang didesiminasi kansika kepada masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaa n Pengelolaa n Media Komunikas i Publik	82 %	82 %	1 Dok	1 Dok	100%	100%	37,750,000	33,965,100	Pendapat an Bagi Hasil	prosentase informasi publik yang didesiminasi kansika kepada masyarakat	82 %	360.275.000	Prioritas anggaran Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Capaian Kinerja								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Latar belakang perubahan	
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
Pelayanan Informasi Publik	prosentase informasi publik yang didesiminasi kansika kepada masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	82 %	82 %	1 Dok	1 Dok	100%	100%	169,600,000	142,646,100	Pendapat an Bagi Hasil	prosentase informasi publik yang didesiminasi kansika kepada masyarakat	82 %	300.000.000	Prioritas Pelayanan Informasi Publik
Layanan Hubungan Media	prosentase informasi publik yang didesiminasi kansika kepada masyarakat	Jumlah Layanan Hubungan Media	82 %	82 %	1 Layanan	1 Layanan	100%	100%	1,086,280,000	1,080,700,000	Pendapat an Bagi Hasil	prosentase informasi publik yang didesiminasi kansika kepada masyarakat	82 %	1.700.000.000	Prioritas Jumlah Pelayanan langganan media massa
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	prosentase informasi publik yang didesiminasi kansika kepada masyarakat	Jumlah Sumber Daya Komunikas i Publik yang Meningkat Kapasitasn ya	82 %	82 %	9 Orang	9 Orang	100%	100%	398,920,000	385,199,200	Pendapat an Bagi Hasil	prosentase informasi publik yang didesiminasi kansika kepada masyarakat	82 %	400.000.000	Prioritas penambahan anggaran
Penyelenggara an Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	prosentase informasi publik yang didesiminasi kansika kepada masyarakat	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyaraka t, Media dan Komunitas dalam Mendisemi nasikan Informasi Program atau Kebijakan	82 %	82 %	1 Dok	1 Dok	100%	100%	24,600,000	23,740,000	Pendapat an Bagi Hasil	prosentase informasi publik yang didesiminasi kansika kepada masyarakat	82 %	450.000.000	Prioritas Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Capaian Kinerja						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Latar belakang perubahan				
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
			Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Tolok Ukur	Target	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							Sebelum
<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>								<b>8,649,000,000</b>	<b>8,549,261,600</b>						
<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>5,128,538,100</b>	<b>5,174,808,100</b>						
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Tingkat kematangan Indeks SPBE Pemkab Garut	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,22 Angka	1,22 Angka	1 Dok	1 Dok	100%	100%	48,977,500	48,977,500	Pendapatan Bagi Hasil	Tingkat kematangan Indeks SPBE Pemkab Garut	1,22 Angka	60.000.000	
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Tingkat kematangan Indeks SPBE Pemkab Garut	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1,22 Angka	1,22 Angka	1 Unit	1 Unit	100%	100%	5,079,560,600	5,125,830,600	Pendapatan Bagi Hasil	Tingkat kematangan Indeks SPBE Pemkab Garut	1,22 Angka	14.500.000.000	Penambahan kegiatan prioritas
<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>3,520,461,900</b>	<b>3,374,453,500</b>				<b>5.544.970.000</b>		
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kematangan Indeks SPBE Pemkab Garut	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1,22 Angka	1,22 Angka	1 Dok	1 Dok	100%	100%	213,589,000	203,179,000	Pendapatan Bagi Hasil	Tingkat kematangan Indeks SPBE Pemkab Garut	1,22 Angka	649.970.000	keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pengeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Capaian Kinerja								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Latar belakang perubahan	
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
		Kabupaten /Kota													
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Tingkat kematangan Indeks SPBE Pekab Garut	Jumlah Pusat Data Pemerintah an Daerah yang Dikelola	1,22 Angka	1,22 Angka	1 Unit	1 Unit	100%	100%	1,699,460,000	1,699,460,000	Pendapat an Bagi Hasil	Tingkat kematangan Indeks SPBE Pekab Garut	1,22 Angka	1.700.000.000	keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja
Penyelenggara an Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Tingkat kematangan Indeks SPBE Pekab Garut	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubun g Layanan Pemerintah Daerah	1,22 Angka	1,22 Angka	3 Layanan	3 Layanan	100%	100%	1,193,070,724	985,451,074	Pendapat an Bagi Hasil	Tingkat kematangan Indeks SPBE Pekab Garut	1,22 Angka	2.000.000.000	keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Ko ta Cerdas dan Kota Cerdas	Tingkat kematangan Indeks SPBE Pekab Garut	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimpleme ntasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1,22 Angka	1,22 Angka	1 Dok	1 Dok	100%	100%	204,034,250	283,165,600	Pendapat an Bagi Hasil	Tingkat kematangan Indeks SPBE Pekab Garut	1,22 Angka	325.000.000	keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Capaian Kinerja								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Latar belakang perubahan	
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Tingkat kematangan Indeks SPBE Pemkab Garut	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1,22 Angka	1,22 Angka	1 Dok	1 Dok	100%	100%	283,165,600	21,910,000	Pendapatan Bagi Hasil	Tingkat kematangan Indeks SPBE Pemkab Garut	1,22 Angka	150.000.000	keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja
Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Tingkat kematangan Indeks SPBE Pemkab Garut	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1,22 Angka	1,22 Angka	1 Dok	1 Dok	100%	100%	68,967,826	68,967,826	Pendapatan Bagi Hasil	Tingkat kematangan Indeks SPBE Pemkab Garut	1,22 Angka	120.000.000	-
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Tingkat kematangan Indeks SPBE Pemkab Garut	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1,05 Angka	1,05 Angka	1 Dok	1 Dok	100%	100%	112,920,100	112,320,000	Pendapatan Bagi Hasil	Tingkat kematangan Indeks SPBE Pemkab Garut	1,22 Angka	600.000.000	keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>									<b>463,000,000</b>	<b>542,000,000</b>				<b>1.325.000.000</b>	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>									<b>463,000,000</b>	<b>542,000,000</b>				<b>1.325.000.000</b>	
<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>									<b>463,000,000</b>	<b>542,000,000</b>				<b>1.325.000.000</b>	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Capaian Kinerja								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Latar belakang perubahan	
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menggunakan data statistik sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	87%	87%	1 Dok	1 Dok	100%	100%	188,000,000	189,781,400	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menggunakan data statistik sektoral	87%	275.000.000	Penyesuaian Kebutuhan Prioritas
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menggunakan data statistik sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	87%	87%	1 Dok	1 Dok	100%	100%	155,000,000	142,314,600	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menggunakan data statistik sektoral	87%	275.000.000	Penyesuaian Kebutuhan Prioritas
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menggunakan data statistik sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	87%	87%	74 SKPD	74 SKPD	100%	100%	120,000,000	109,904,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menggunakan data statistik sektoral	87%	225.000.000	-

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Capaian Kinerja							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Latar belakang perubahan			
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
Pengembangan Infrastruktur	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menggunakan data statistik sektoral	Jumlah Infrastru ktur Statistik	87%	87%	1 Unit	1 Unit	100%	100%	0	100,000,000	Pendapat an Bagi Hasil	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menggunakan data statistik sektoral	79 %	550.000.000	-
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>									<b>300,000,000</b>	<b>280,584,600</b>			<b>825.000.000</b>		
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>									<b>300,000,000</b>	<b>280,584,600</b>			<b>825.000.000</b>		
<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>									<b>300,000,000</b>	<b>280,584,600</b>			<b>825.000.000</b>		
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta	Indeks keamanan Informasi (INDEKS KAMI)	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota yang Ditetapkan	450 Angka	450 Angka	3 Dok	3 Dok	100%	100%	76,119,800	71,386,700	Pendapat an Bagi Hasil	Indeks keamanan Informasi (INDEKS KAMI)	450 Angka	125.000.000	-
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta	Indeks keamanan Informasi (INDEKS KAMI)	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaa n Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	450 Angka	450 Angka	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	107,677,200	133,303,400	Pendapat an Bagi Hasil	Indeks keamanan Informasi (INDEKS KAMI)	450 Angka	150.000.000	Untuk menunjang kegiatan operasional Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kab.Garut

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			Latar belakang perubahan	
	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks keamanan Informasi (INDEKS KAMI)	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Mengguna kan Layanan Keamanan Informasi	450 Angka	450 Angka	96 Perangk at	96 Perangka t	100%	100%	116,203,000	75,894,500	Pendapat an Bagi Hasil	Indeks keamanan Informasi (INDEKS KAMI)	450 Angka	550.000.000	Penunjang kegiatan operasional Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut Tahun 2023 disusun sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2023 yang mengarah pada pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah, Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Lembaga Teknis Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika.

Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut tahun 2023 diharapkan dapat memberikan umpan balik yang positif dalam pengambilan keputusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah terhadap upaya pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis pada masyarakat melalui peningkatan keterlibatan para pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam mewujudkan *Good Governance*.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut Tahun 2023 ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Komunikasi dan Informatika. Diharapkan semua elemen kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, dan kinerja pegawai, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN